



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:



1. Masih kurangnya inovasi, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
2. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
3. Ketersediaan pangan yang beragam antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
6. Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, terkena dampak adanya ombak besar, dan sebagainya
7. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
8. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.



9. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kepada tujuan dari Dinas Pangan yaitu **terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal** dapat dilihat dari tabel berikut.







**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Aspek Kajian (Tujuan)	Capaian/Kondisi Saat ini	Standart yg digunakan	Faktor yg mempengaruhi		Pemasalahan
			Internal	Eksternal	
<b>terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal</b>	PPH Ketersediaan 78,78	Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi	Internalisasi, edukasi, advokasi	Produksi pangan, Kondisi cuaca, Bencana alam	Masih rendahnya Ketersediaan pangan yang beragam terutama produksi lokal
	Penanganan daerah rawan pangan	Pendataan	Pemetaan daerah rawan pangan		Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
	Koefisien varian harga pangan strategis CV beras $\leq 1\%$ CV cabe $\leq 31,2\%$ CV daging ayam $\leq 10,7\%$	Operasi pasar	Pengumpulan data informasi harga	Fluktuasi Harga	Harga bahan pangan masih fluktuatif
	PPH Konsumsi 77,1	Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi	Promosi, Pemantauan/ Pengawasan, Pengujian	Regulasi	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH : 77,1)
	Keamanan pangan 78 %		(keamanan pangan		Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius



### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menetapkan Visi sebagai berikut : "Babel Sejahtera, provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi'

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas ditetapkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastuktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

### **3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;**

4. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik; dan
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini menekankan pencapaian Misi ke-3 yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal.

Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Program Unggulan Agropolitan. Secara eksplisit tidak dicantumkan yang langsung terkait dengan pembangunan ketahanan pangan, tetapi hubungan tidak secara langsung



disebutkan dalam program memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal. Kondisi ini menjadi pemacu ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meningkat.

### **3.3. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota**

#### **3.3.1 Hasil Telaahan Terhadap Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian**

Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pangan 2014-2019 menekankan bahwa peningkatan kedaulatan pangan merupakan salah satu cara mewujudkan agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemantapan





ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Berdasarkan adalah Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian untuk pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.



Kebijakan ketahanan pangan terdapat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada
  - peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan
  - memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.
2. Aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada:
  - stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta
  - pengelolaan cadangan pangan.
3. Aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada:
  - Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan
  - pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

### **3.3.2. Telaah Renstra Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Rencana strategis dari Dinas yang memiliki kewenangan terkait ketahanan pangan di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditelaah antara lain :

#### **1. Kabupaten Bangka**

Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pangan Kab. Bangka 2014 – 2018 (sebelumnya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bangka) yang terkait dengan ketahanan pangan adalah :

Tujuan : Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan daerah

Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memperoleh pangan dalam jumlah dan

kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau

Indikator Sasaran :

1. Cakupan wilayah peningkatan ketahanan pangan
2. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
3. Ketersediaan energi dan protein per kapita
4. Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun
5. Skor pola pangan harapan (PPH)

## 2. Kabupaten Bangka Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat 2016 – 2021 yang terkait dengan ketahanan pangan adalah

Tujuan : Mengembangkan Agribisnis dan Agroindustri

Sasaran : Terselenggaranya sistem pelayanan informasi ketahanan pangan yang cepat, tepat, kontinyu, *up to date* dan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi

Indikator Sasaran :

1. Terdatanya situasi dan kondisi ketersediaan pangan di tingkat pedagang dan rumah tangga konsumen;
2. Terdatanya harga komoditi pangan di tingkat produsen dan konsumen; dan
3. Tersedianya data/informasi situasi pangan dan gizi.

Sasaran : Terwujudnya pemaantaun ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.



Indikator Sasaran :

1. Konsumsi Energi 2.150 kkal/kap/hari konsumsi, protein... gram/kap/hari
2. Stabilitasnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat produsen ( $\geq$  HPP) dan di tingkat konsumen ( CV  $<5$ )
3. Penguatan cadangan pangan tingkat pemerintah tingkat kabupaten (100 ton setara beras)

Sasaran : Meningkatkan pemantapan  
7 penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Indikator Sasaran :

1. Berkembangnya produk pangan olahan
2. Tersedianya data situasi pola konsumsi pangan dalam pencapaian Skor PPH
3. Dinas TPHP2KKP Kabupaten Belitung  
Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas TPHP2KKP Kabupaten Belitung yang terkait dengan ketahanan pangan periode tahun 2013 – 2018 adalah :  
Tujuan : Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah  
Sasaran : Meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah
4. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur  
Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur periode 2016 – 2021 yang terkait dengan ketahanan pangan adalah:  
Tujuan : Menurunkan tingkat ketergantungan bahan pangan dari luar daerah  
Sasaran : Ketersediaan pangan kabupaten yang cukup, aman dan terjangkau



#### **4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

##### **4.1.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam rencana tata ruang Kepulauan Bangka Belitung pasal 31 dijelaskan Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian pangan dengan luas kurang lebih 355.453 ha (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga hektar, meliputi :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha (tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha (sebelas ribu empat puluh empat hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha (seratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473 Ha (tiga puluh delapan empat ratus tujuh puluh tiga hektar).



Selanjutnya pemerintah Kabupaten/kota perlu menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional. Pola pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pangan berkelanjutan.

#### **4.1.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 18 isu strategis prioritas untuk proses KLHS. Diantara 18 isu strategis prioritas tersebut, 3 diantaranya terkait dengan urusan Pangan, yaitu: masalah belum terkendalinya inflasi; kerawanan pangan; dan penurunan status kesehatan masyarakat.

##### **a) Belum terkendalinya inflasi**

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu komponen yang diukur dalam perhitungan inflasi di antaranya makanan (pangan). Komoditas pangan pada tahun 2016 mempunyai pengaruh 4,65 % dari nilai inflasi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebutuhan pangan utama masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar disupply dari daerah lain.



Ketersediaan kebutuhan pangan tersebut tentunya dipengaruhi oleh lancar tidaknya jalur distribusi dari daerah/pulau lain. Penyebab utama permasalahan terhambatnya kelancaran jalur distribusi adalah faktor cuaca ekstrem di perairan.

Secara umum perkembangan inflasi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 berada diatas inflasi nasional sementara tahun 2015 berapa lebih kurang sama dengan tingkat inflasi nasional, namun di tahun 2016 inflasi Kepulauan Bangka Belitung berada jauh di atas nasional yaitu mencapai 6,75 % sementara nasional berada pada tingkat inflasi yang rendah yaitu 3,02, tentunya menjadi pertanyaan besar terkait dengan kondisi harga di Kepulauan Bangka Belitung sehingga menyebabkan inflasi yang cukup tinggi. Inflasi di Kepulauan Bangka Belitung diukur oleh dua (2) wilayah yaitu Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan, berdasarkan dua wilayah tersebut ternyata Pangkalpinang menjadi wilayah yang memberikan pengaruh inflasi tertinggi dan secara nasional kota Pangkalpinang merupakan yang tertinggi sebesar 7.78 persen dan diikuti oleh Sibolga 7.39 Persen, itu artinya perkembangan harga barang dan jasa ini akan berdampak langsung pada tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat di daerah tersebut khususnya di pulau Bangka.

Beberapa faktor pendorong dianalisa akan mempengaruhi kecenderungan masa depan terkait inflasi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

1. Kondisi geografis kepulauan dan tingkat ketergantungan pasokan barang dari luar daerah tergolong tinggi (kemandirian pangan yang rendah)



Dampak :

Inflasi merupakan indikator kinerja daerah yang harus selalu dipantau dan dijaga angka inflasinya pada posisi yang tidak jauh dari yang telah ditargetkan pemerintah daerah. Untuk itu faktor pendorong penyebab inflasi harus diwaspadai diantaranya kelancaran distribusi barang menjadi permasalahan utama, penghambat kelancaran distribusi dikarenakan faktor kondisi geografis kepulauan dan ketergantungan pasokan barang dari luar daerah yang tergolong tinggi, sedangkan konektivitas antar daerah masih minim, faktor cuaca menyebabkan gelombang laut tinggi, sehingga itu semua semakin memperlambat jalur distribusi barang. Dampaknya barang yang terlambat sampai di pasaran sedangkan dibutuhkan masyarakat tentunya akan berlaku hukum permintaan, maka secara otomatis harga barang akan naik.

2. Jumlah distributor / pedagang besar

Jumlah pedagang besar/distributor di Kepulauan Bangka Belitung masih sedikit sehingga kondisi pasarnya bersifat oligopoli, dengan kondisi ini tentunya kurang menguntungkan bagi masyarakat karena bisa dengan mudah perubahan harga dapat ditentukan oleh para penjualnya dan akhirnya masyarakatlah yang dirugikan dengan kondisi harga tersebut.

3. Konsumsi masyarakat yang meningkat

Konsumsi masyarakat yang terus meningkat tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi yang semakin tumbuh, sehingga harapannya kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Dampak negatif konsumsi masyarakat



tinggi namun tidak disiapkan dengan persediaan barang yang mencukupi akan berakibat kenaikan harga yang tidak terkendali tentunya akan mendorong inflasi semakin tinggi.

b) Kerawanan pangan

Sebagian besar penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berprofesi sebagai petani lada, karet, dan kelapa sawit sehingga sangat terbatas jumlah petani sawah atau sayuran. Karena kondisi tanah di Kepulauan Bangka Belitung cocok untuk kegiatan pertanian berupa perkebunan. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan pangan seperti beras, sayuran dan buah-buahan dipasok dari luar pulau.

Angka konsumsi beras penduduk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  $\pm 92,14$  Kg/Kapita/tahun dengan ketergantungan terhadap beras dari luar berkisar 70% (SLHD Babel 2014). Berdasarkan data BPS Babel 2016, produksi padi (sawah dan ladang) di Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 27.068 ton gabah kering giling (GKG) dengan konversi beras GKG ke beras sebesar 62,74% atau sekitar 16.982,46 ton. Sedangkan angka perkiraan kebutuhan beras pada tahun yang sama sebesar 125.855 ton. Artinya pada tahun 2016, kebutuhan beras yang mampu disupply dari lokal hanya sekitar 13%, sisanya harus dipasok dari luar pulau Bangka dan Belitung.

Berdasarkan data produksi dan konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Kementan (2017), beberapa komoditi sayuran seperti kubis-kubisan, bawang merah, bawang putih, kentang dan tomat 100% harus dipasok dari luar karena tanaman ini merupakan tanaman budidaya dataran tinggi. Beberapa komoditi sayuran dan



buah-buahan dapat dibudidayakan di Bangka Belitung namun belum dapat memenuhi kebutuhan lokal, antara lain cabai merah, cabai rawit, sawi, buncis, kangkung, alpukat, melon, pepaya, dan pisang. Ketergantungan cabai merah dan cabai rawit dari luar pulau berkisar 78-85%. Ketergantungan akan buncis dari luar cenderung menurun dari 91% menjadi 53%, sawi relatif meningkat hingga 30%, dan kangkung berkisar 30-50% pada tahun 2011-2014. Komoditi buah-buahan seperti melon lebih dari 50%, alpukat, pepaya, dan pisang sebagian harus dipasok dari luar pulau Bangka dan Belitung untuk memenuhi kebutuhan dalam provinsi. Sedangkan untuk komoditi dari

sektor ternak terutama penghasil daging relatif cukup terpenuhi dari dalam provinsi, kecuali telur ayam ras. Kebutuhan akan telur ayam ras harus dipasok dari luar sekitar 85-94% pada tahun 2011-2014.

Angka kebutuhan konsumsi beras, sayur, buah-buahan, daging, telur, ikan dan pangan lainnya semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Angka laju pertumbuhan penduduk Kepulauan Bangka Belitung berkisar 2%, kondisi ini tentu akan memberikan risiko terjadinya peningkatan angka kerawanan pangan di Bangka Belitung. Disamping itu produktivitas sektor sumber pangan terutama pertanian yang masih rendah sehingga kebutuhan akan pangan yang harus dipasok dari luar pulau. Kondisi geografis Bangka Belitung sebagai provinsi Kepulauan yang mana jalur pengangkutan sumber pangan umumnya melalui jalur laut. Kondisi cuaca seperti kecepatan angin, tinggi gelombang, sangat mempengaruhi pemasokan/supply

bahan pangan sehingga berisiko terhadap kerawanan pangan.

c) Penurunan status kesehatan masyarakat

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat diukur dari beberapa indikator, antara lain yang terkait langsung dengan pangan adalah status gizi balita/bayi.

Beberapa faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat yang terkait dengan pangan adalah :

1. perilaku hidup masyarakat yaitu terkait pola makan
2. lingkungan, semakin menurunnya kualitas lingkungan, yang juga mempengaruhi tingkat cemaran pada produk pangan segar.

#### **4.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau ke depannya dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai



fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berikut ini adalah Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu **“Rentannya tingkat ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**